



KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN  
DAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH (KUA)

**KUA 2023**  
KOTA CILEGON



Jl. Jenderal Sudirman No. 02 Cilegon



+62 254 286577



[www.kota-cilegon.go.id](http://www.kota-cilegon.go.id)  
[info@kota-cilegon.go.id](mailto:info@kota-cilegon.go.id)



**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA PEMERINTAH KOTA CILEGON**  
**DENGAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON**

**NOMOR : 903/ /KUA/BPKPAD/2022**  
**NOMOR : IX/BA/DPRD - 33 /2022**

**TENTANG**  
**KEBIJAKAN UMUM**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **H. HELLDY AGUSTIAN, SE., SH., MH**  
Jabatan : Walikota Cilegon  
Alamat : Jln. Jenderal Sudirman No. 2 - Cilegon

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Cilegon

2. a. Nama : **ISRO MI'RAJ, SE., MH**  
Jabatan : Ketua DPRD Kota Cilegon  
Alamat : Jln. Jendral Sudirman No.1 Cilegon
- b. Nama : **H. HASBI SIDIK, ST., M.SI**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon  
Alamat : Jln. Jendral Sudirman No.1 Cilegon
- c. Nama : **HJ. NUKROTUL UYUN, SE., M.Ak**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon  
Alamat : Jln. Jendral Sudirman No.1 Cilegon

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Cilegon, 1 September 2022

WALIKOTA CILEGON,  
Selaku PIHAK PERTAMA

H. HELLDY AGUSTIAN, SE., SH., MH

PIMPINAN DPRD KOTA CILEGON,  
Selaku PIHAK KEDUA

ISRO MURAJ, SE., MH  
KETUA

H. HARBI SIDIK, ST., M.Si  
WAKIL KETUA

HJ. NURROTUL UTUN, SE., M.Ak  
WAKIL KETUA



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji syukur patut kita panjatkan kehadiran ALLAH SWT, karena atas Rahmat dan Karunia-Nyalah Kebijakan Umum APBD (KU-APBD) Kota Cilegon Tahun Anggaran 2023 telah selesai disusun. KUA Kota Cilegon Tahun 2023 merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cilegon serta Permendagri No 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun anggaran 2023, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, akan menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2023. KUA 2023 disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021-2026.

Demikian kata pengantar ini, kami mengharapkan tanggapan dan saran yang membangun guna kesempurnaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Kota Cilegon.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.





## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	II
DAFTAR ISI .....	III
DAFTAR TABEL .....	IV
DAFTAR GAMBAR .....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
I.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum-Apbd Tahun Anggaran 2023 .....	1
I.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 .....	2
I.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 .....	2
I.4 Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH .....</b>	<b>5</b>
II.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	5
II.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	20
<b>BAB III ASUMSI DASAR PENYUSUNAN R-APBD 2023.....</b>	<b>22</b>
III.1 Asumsi Dasar yang digunakan RAPBN .....	22
III.2 Asumsi Dasar RAPBD Provinsi .....	23
III.3 Asumsi Dasar RAPBD Kota Cilegon .....	24
<b>BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....</b>	<b>28</b>
IV.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah .....	28
IV.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah .....	29
<b>BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....</b>	<b>30</b>
V.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja .....	30
V.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga .....	30
<b>BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....</b>	<b>32</b>
VI.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan .....	32
VI.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan .....	32
<b>BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN .....</b>	<b>39</b>
VII.1. Strategi pada Misi 1 Menghadirkan Pemerintahan Daerah Yang Profesional Dan Akuntabel.....	39
VII.2. Strategi pada Misi 2 Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas .....	41
VII.3. Strategi pada Misi 3 Meningkatkan Pelayanan Kesehatan.....	42
VII.4. Strategi pada Misi 4 Mewujudkan Kesejahteraan yang Merata .....	39



VII.5. Strategi pada Misi 5 Mewujudkan Masyarakat Berperadaban .....	43
VII.6. Strategi dan Arah Kebijakan Penanganan Covid-19 .....	52
<b>BAB VII PENUTUP .....</b>	<b>60</b>





## DAFTAR TABEL

TABEL II-1. PERKEMBANGAN KEMISKINAN KOTA CILEGON .....	11
TABEL II-2. PERKEMBANGAN KOMPONEN IPM KOTA CILEGON TAHUN 2017 – 2021.....	12
TABEL II-3. INDEKS GINI KOTA CILEGON DAN DAERAH SEKITARNYA TAHUN 2019-2021 .....	17
TABEL III- 1. SINKRONISASI PRIORITAS RKP PUSAT, RKPD PROVINSI BANTEN DAN RKPD KOTA CILEGON TAHUN 2023 .....	26
TABEL III-2. PROYEKSI EKONOMI MAKRO KOTA CILEGON TAHUN 2023.....	27
TABEL IV- 1. TARGET PENDAPATAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2023 .....	29
TABEL V- 1. RENCANA BELANJA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2023 .....	30
TABEL VI- 1. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2023 .....	32
TABEL VI-2. RINGKASAN RAPBD KOTA CILEGON TAHUN 2023.....	33
TABEL VII- 1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN MISI 1 MENGHADIRKAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL.....	35
TABEL VII-2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN MISI 2 MEWUJUDKAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS .....	41
TABEL VII-3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN MISI 3 MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN	42
TABEL VII-4. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN MISI 4 MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN YANG MERATA.....	43
TABEL VII- 5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN MISI 5 MEWUJUDKAN MASYARAKAT BERPERADABAN.....	47





## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR II- 1. REAL GDP GROWTH (% , YEAR ON YEAR).....	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>	5
GAMBAR II- 2. NILAI EKSPOR INDONESIA, 2020-2022 .....		6
GAMBAR II- 3. KONTRIBUSI EKSPOR PER SEKTOR (JANUARI 2022).....		7
GAMBAR II- 4. KONTRIBUSI SEKTOR PDRB ADHB KOTA CILEGON TAHUN 2021.....		8
GAMBAR II- 5. KONTRIBUSI SEKTOR PDRB ADHB KOTA CILEGON TAHUN 2021.....		9
GAMBAR II- 6. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA .....		8
GAMBAR II- 7. KEMISKINAN KOTA CILEGON .....		11
GAMBAR II- 8. IPM KOTA CILEGON DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2021 .....		12
GAMBAR II- 9. UMUR HARAPAN HIDUP (UHH) KOTA CILEGON TAHUN 2016-2021 .....		13
GAMBAR II- 10. CAPAIAN UMUR HARAPAN HIDUP KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BANTEN TAHUN 2021 .....		13
GAMBAR II- 11. HARAPAN LAMA SEKOLAH (HLS) KOTA CILEGON TAHUN 2016-2021 .....		14
GAMBAR II- 12. CAPAIAN HARAPAN LAMA SEKOLAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BANTEN TAHUN 2021 .....		14
GAMBAR II- 13. RATA-RATA LAMA SEKOLAH (RLS) KOTA CILEGON TAHUN 2016-2021 .....		15
GAMBAR II- 14. CAPAIAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BANTEN TAHUN 2021 .....		16
GAMBAR II- 15. PERKEMBANGAN DAYA BELI MASYARAKAT CILEGON TAHUN 2017-2021.....		16
GAMBAR II- 16. CAPAIAN DAYA BELI MASYARAKAT KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BANTEN TAHUN 2021 .....		17
GAMBAR II- 17. JUMLAH PENAMBAHAN INVESTASI PMA & PMDN TAHUN 2021 (DALAM JUTAAN RUPIAH).....		18
GAMBAR II- 18. PERBANDINGAN REALISASI INVESTASI TAHUN 2021 DI PROVINSI BANTEN.....		18
GAMBAR II- 19. LAJU PENINGKATAN INVESTASI KOTA CILEGON 2017 -2021 .....		19
GAMBAR II- 20. PERBANDINGAN INFLASI KOTA CILEGON DENGAN NASIONAL DAN PROVINSI BANTEN .....		19
GAMBAR II- 21. INFLASI KOTA CILEGON BERDASARKAN KELOMPOK PENGELUARAN TAHUN 2021 (YOY).....		20



## BAB I PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum-Apbd Tahun Anggaran 2023

Tahapan awal perencanaan pembangunan Kota Cilegon Tahun Anggaran 2023 adalah ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cilegon Tahun 2023. Penganggaran merupakan tahapan selanjutnya dari proses perencanaan, dimana target kinerja yang sudah ditetapkan dalam proses perencanaan diturunkan dalam uraian tahapan dan kegiatan yang sudah berbasis output dan berbasis anggaran. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun.

Proses penganggaran dimulai dengan penyusunan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang akan dibahas dan disepakati bersama antara Walikota dengan Pimpinan DPRD Kota Cilegon yang akan menjadi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama. KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Penyusunan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Cilegon Tahun 2023 berpedoman pada Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cilegon Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cilegon Tahun 2023. RKPD Kota Cilegon Tahun 2023 merupakan RKPD tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021-2026. RKPD Kota Cilegon Tahun 2023 mengusung tema pembangunan yaitu :

#### **“MENINGKATKAN KUALITAS SDM DAN DAYA SAING EKONOMI MENUJU CILEGON BARU, MODERN DAN BERMARTABAT”**

Selain berpedoman pada RKPD, dokumen KUA-PPAS juga mengacu pada kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat. KUA ini menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023 serta Rencana Kerja Anggaran Perangkat daerah (RKA-PD) Tahun anggaran 2023 di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.

Secara substansi, KUA memuat kebijakan daerah tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun, yang menjabarkan lebih lanjut tentang :





- a. Kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan;
- b. Asumsi dasar penyusunan RKPD tahun selanjutnya dan asumsi lainnya terkait dengan indikator makro ekonomi daerah;
- c. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah;
- d. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah;
- e. Kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah.

## **I.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023**

Tujuan disusunnya KUA Tahun Anggaran 2023 adalah untuk memberikan arah pembangunan melalui penguatan pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. KUA ini juga menjadi pedoman kebijakan umum APBD dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan melalui APBD Tahun Anggaran 2023. Dengan disusunnya KUA Tahun Anggaran 2023 diharapkan dapat mengatur tentang prinsip dan kebijakan penyusunan APBD berkaitan dengan gambaran kondisi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya, serta kebijakan daerah lainnya.

## **I.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023**

Dasar Peraturan Perundang-undangan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang - Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);





5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;





20. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 19 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cilegon;
21. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon;
22. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cilegon Tahun 2023.

#### **I.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Kebijakan Umum APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2023 meliputi 5 bab sebagai berikut :

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang penyusunan, tujuan penyusunan dan dasar (hukum) penyusunan Kebijakan Umum Anggaran APBD.

##### **BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

Menguraikan mengenai arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.

##### **BAB III. ASUMSI DASAR PENYUSUNAN APBD**

Menjelaskan tentang asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam perumusan dan penyusunan APBN dan APBD.

##### **BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

Menjelaskan tentang kebijakan perencanaan pendapatan daerah serta target pendapatan daerah.

##### **BAB V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

Menjelaskan tentang kebijakan terkait perencanaan belanja daerah serta rencana belanja operasi, belanja modal dan belanja transfer dan belanja tidak terduga.

##### **BAB VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Menjelaskan kebijakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan

##### **BAB VII. STRATEGI PENCAPAIAN**

Menjelaskan tentang langkah konkret dalam mencapai target.

##### **BAB VIII. PENUTUP**

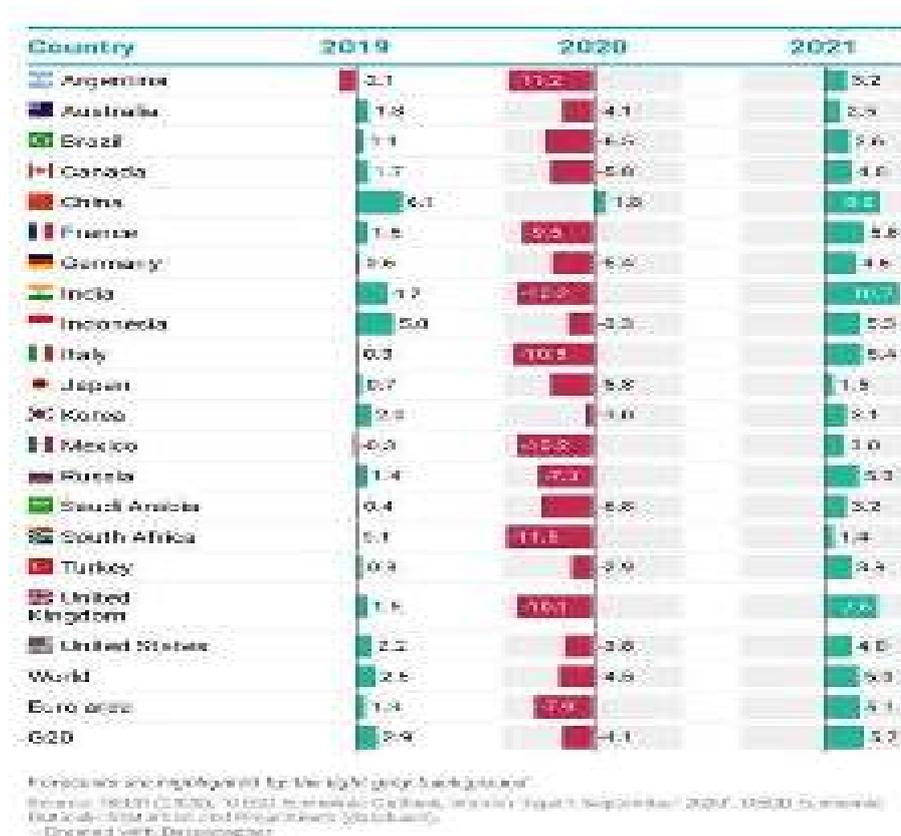


## BAH II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

### II.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

#### A. Arah Kebijakan Ekonomi Global

Analisa IMF menyatakan bahwa pemulihan ekonomi global di tahun 2021 pasca pandemi covid-19, akan semakin meningkat di tahun 2022. Pemulihan tersebut tidak hanya bertumpu pada Amerika Serikat dan Tiongkok, tetapi disertai perbaikan pada negara Eropa, Jepang dan India. Ekonomi global di tahun 2022 diperkirakan akan meningkat.



Gambar II- 1 Real GDP Growth (% , year on year)

Perkembangan yang terus berlangsung dikonfirmasi oleh kinerja sejumlah indikator pada Desember 2021 antara lain Purchasing Managers' Index (PMI), indeks keyakinan konsumen dan penjualan ritel yang tetap kuat.

Dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global tetap berlanjut hingga mencapai 4,4%

pada tahun 2022. Volume perdagangan dan harga komoditas dunia masih meningkat, sehingga menopang prospek ekspor negara berkembang.

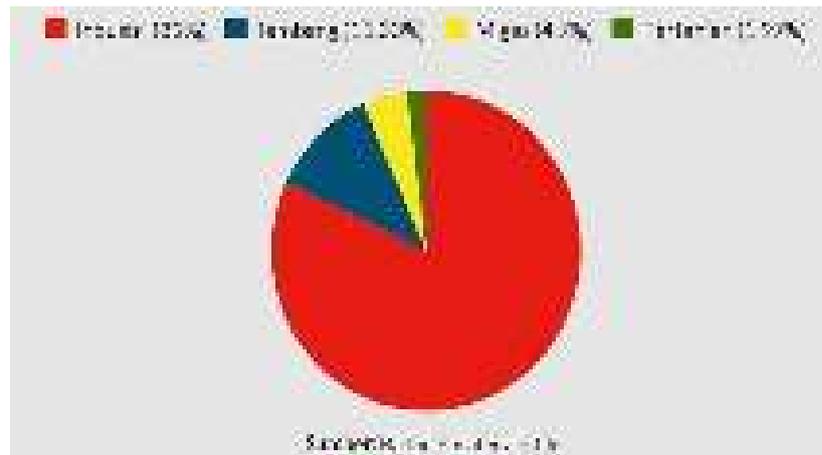
### B. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 diperkirakan meningkat ke kisaran 5,3 – 5,9%, sejalan dengan akselerasi konsumsi swasta dan investasi. Perkiraan tersebut didukung oleh mobilitas yang terus meningkat sejalan dengan akselerasi vaksinasi, pembukaan ekonomi yang semakin luas, dan stimulus kebijakan yang berlanjut. Selain itu, BPS mengumumkan bahwa nilai ekspor Indonesia pada Januari 2022 mencapai 19,16 milyar dollar. Naik sekitar 25,31% dibandingkan dengan Januari 2021.

Ekspor non migas merupakan penyumbang nilai terbesar ekspor Indonesia di Januari 2022 yaitu sebesar 95,3% dari total ekspor. Kinerja lapangan utama, seperti industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, dan pertanian tumbuh meningkat. Sektor industri tetap menjadi penyumbang terbesar nilai ekspor Indonesia pada Januari 2022, yakni 82% dari total ekspor.



Gambar II-2. Nilai Ekspor Indonesia, 2020-2022



**Gambar II-3. Kontribusi Ekspor per Sektor (Januari 2022)**

### C. Arah Kebijakan Ekonomi Regional

Pemerintah Provinsi Banten memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 sebesar 5% dan di tahun 2023 sebesar 5,2% (Sumber : Rancangan Awal RKPD Banten Tahun 2023). Proyeksi tersebut berdasarkan asumsi antara lain :

*pertama*, trend pelandaian kasus Covid-19 terus berlanjut bahkan mengalami penurunan yang lebih cepat dari kondisi saat ini;

*kedua*, cakupan vaksinasi kedua mengalami peningkatan yang signifikan, yang mana di tahun 2021 capaiannya masih rendah. Hingga tanggal 21 april 2022, dari 9,2 juta sasaran vaksinasi di Provinsi Banten, cakupan peserta vaksin dosis 1 mencapai 93,48%, dosis 2 sebanyak 73.98% dan dosis 3 sebanyak 18,97% (sumber: vaksin.kemkes.go.id)

*ketiga*, diaplikasikannya protokol kesehatan di berbagai sektor sehingga roda ekonomi Banten mampu tumbuh di tengah pandemi covid-19.

*keempat*, meningkatnya mobilitas masyarakat serta pembukaan sektor-sektor strategis. Perbaikan kondisi ekonomi mendorong spending dan konsumsi Rumah Tangga. Mobilitas masyarakat pada Besar Keagamaan Nasional dan Natal Tahun Baru lebih meningkat sejalan dengan vaksinasi yang lebih luas. Perjalanan haji-umroh lebih meningkat dengan telah dibukanya penerbangan internasional. Peningkatan ekonomi juga didorong dengan berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti Jalan Tol Serang-Panimbang, Tol Serpong-Balaraja, dan SPAM Karian-Serpong serta kinerja investasi antara lain pada sektor konstruksi dan industri. dimulainya pembangunan pabrik Chandra Asri Petrochemical 2 untuk unit naphtha cracker dan polymerized olefins serta pembangunan pabrik baru PT Krakatau Steel dan Krakatau Steel dan Krakatau Posco.

Kinerja ekspor diperkirakan semakin meningkat khususnya ekspor manufaktur dari kenaikan ekspor alas kaki seiring demand untuk limpahan order negara lain dan adanya event internasional, serta eksport industri pengolahan Ekspor baja meningkat seiring kenaikan kapasitas pabrik hot strip mill PT Krakatau Steel Kinerja eksport petrokimia akan

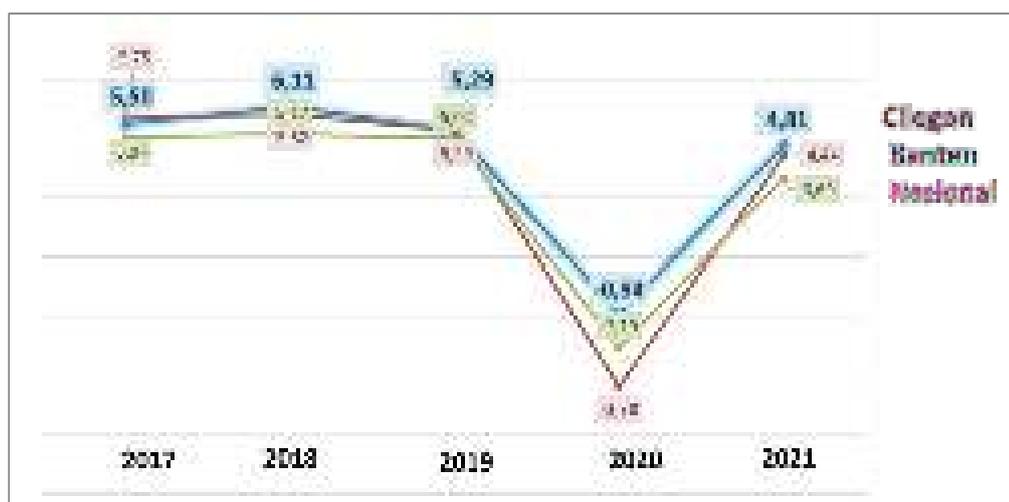
tejaga dengan ditopang oleh kebutuhan global yang tetap tinggi seiring keterbatasan produksi negara lain.

Sedangkan TPT di tahun 2022 dan 2023 diproyeksikan mengalami penurunan menjadi 8,5% dan 8% dengan beberapa asumsi diantaranya, pertama, meningkatnya investasi yang memiliki karakteristik padat karya. Kedua, meningkatnya sisi supply tenaga kerja dengan tingkat skill yang lebih tinggi yang lebih sesuai dengan sisi demand dari pemberi kerja. Ketiga, berkurangnya jurusan kejuruan yang tidak match dengan kebutuhan pasar kerja dan bertambahnya jurusan/kejuruan yang lebih match dengan kebutuhan pasar tenaga kerja diiringi dengan meningkatnya kerjasama antara institusi pendidikan dengan institusi pemberi kerja.

#### D. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Penurunan kasus Covid-19 di Kota Cilegon dan peningkatan cakupan vaksinasi membuat kegiatan perekonomian masyarakat berangsur normal. Konsumsi masyarakat diperkirakan terus meningkat seiring dicabutnya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kinerja investasi juga diperkirakan meningkat seiring dengan pulihnya kondisi ekonomi baik pada tingkat global, nasional dan regional.

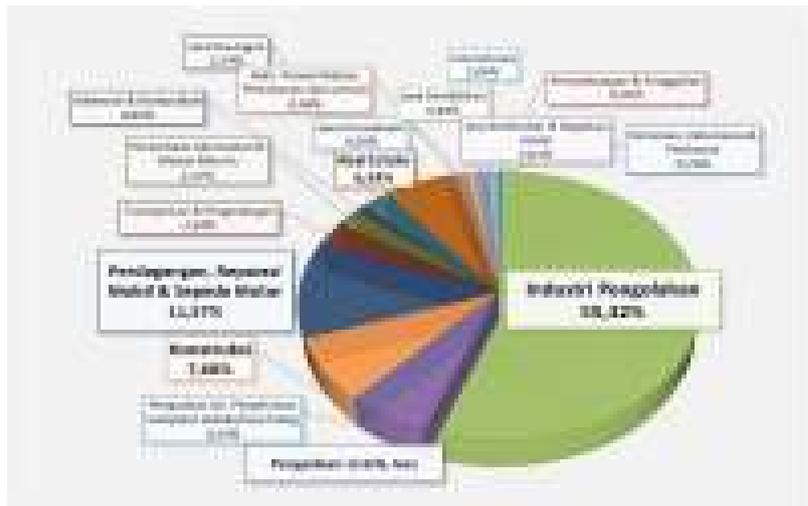
Pada tahun 2020, LPE Kota Cilegon mencapai minus 0,94% sedangkan Provinsi Banten mencapai minus 3,38% dan nasional mencapai minus 2,19%, demikian juga dengan seluruh kabupaten/kota di provinsi banten, mencapai LPE yang minus. Jika dibandingkan dengan Provinsi, Nasional, dan Kota-kota di Provinsi Banten, penurunan LPE Kota Cilegon tahun 2020 adalah terkecil atau mengalami pencapaian yang lebih baik.



**Gambar II-4. Kontribusi Sektor PDRB ADHB Kota Cilegon Tahun 2021**

Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Berdasarkan data BPS Kota Cilegon, PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 pada jenis pengeluaran konsumsi rumah tangga di tahun 2021 yaitu 14.760.266,62 (juta rupiah), maka pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di tahun 2021 adalah 32 (juta rupiah). Pada PDRB pendekatan produksi, struktur PDRB Cilegon sebagai kota industri didominasi aktivitas produksi industri pengolahan. Berdasarkan data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, rata-rata dominasi sektor industri pengolahan berada di atas 55 persen dari total PDRB Kota Cilegon di tahun 2021.

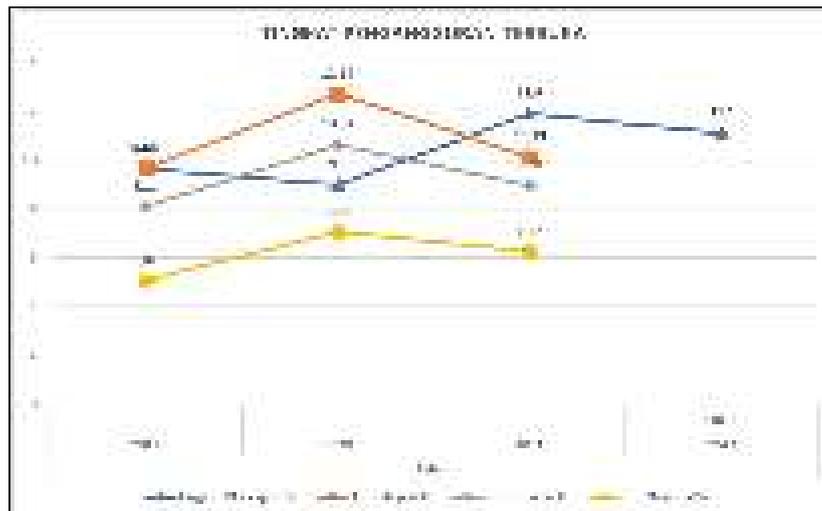


**Gambar II-5. Kontribusi Sektor PDRB ADHB Kota Cilegon Tahun 2021**  
Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Seiring peningkatan kapasitas pabrik hot strip mill PT Krakatau Steel dan ekspor petrokimia, kinerja ekspor sektor industri pengolahan diperkirakan akan mengalami peningkatan. Hal ini sejalan dengan meningkatnya kebutuhan global seiring dengan keterbatasan produksi negara lain. Pembangunan pabrik baru PT. Krakatau Steel dan dimulainya pembangunan pabrik Chandra Asri Petrochemical 2 untuk unit naphtha cracker dan polymerized olefins, diperkirakan akan menumbuhkan kinerja sektor konstruksi.

Kondisi ketenagakerjaan di tahun 2023 juga diperkirakan membaik. Pertumbuhan ekonomi akan membuka peningkatan kesempatan kerja yang mendorong terhadap penurunan tingkat pengangguran.

Tingkat pengangguran terbuka yang pada tahun 2020 meningkat sangat signifikan hingga mencapai 12,69% atau meningkat sebesar 3,01% dari tahun 2019, dan merupakan tertinggi di Provinsi Banten, melebihi TPT Nasional dan TPT Provinsi Banten, pada tahun 2021 mengalami penurunan yang sangat signifikan atau mencapai 10,13% atau menurun sebesar 2,56%, yang merupakan penurunan yang paling besar dibandingkan dengan Nasional, Provinsi dan seluruh kota di provinsi Banten.



**Gambar II-6. Tingkat Pengangguran Terbuka**

Sumber : Statistik, BPS Kota Cilegon

Kinerja pembangunan sosial pada tahun 2023 juga diperkirakan membaik. Pulihnya perekonomian pasca pandemi covid-19 disertai dengan kegiatan sosial ekonomi yang berangsur normal, mendorong kegiatan sosial ekonomi dapat kembali dilakukan lebih efektif melalui tatap muka. Tingkat Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia baik pada komponen indeks pendidikan, indeks kesehatan maupun daya beli diperkirakan akan meningkat di tahun 2023.

Jika dibandingkan dengan provinsi dan nasional, tingkat kemiskinan di Kota Cilegon jauh lebih rendah, yang mana pada tahun 2019 tingkat kemiskinan Kota Cilegon mencapai 3,03%, Provinsi Banten sebesar 4,94% dan Nasional mencapai 9,22%. Dengan adanya pandemi covid-19, tingkat kemiskinan di tahun 2020 mengalami peningkatan, baik pada tingkat lokal, regional maupun nasional.

Tingkat kemiskinan pada tahun 2021 masih mengalami peningkatan, diperkirakan penambahan jumlah penduduk miskin adalah dari penduduk yang sebelumnya berada pada kategori rentan miskin. Namun jika dibandingkan dengan Kota lain di Provinsi Banten, seluruh kota menunjukkan adanya peningkatan tingkat kemiskinan di tahun 2021. Adanya berbagai program perlindungan sosial serta pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat tidak mampu ataupun mengalami dampak ekonomi dari pandemi covid-19 berkontribusi baik yang dilakukan Pemerintah Daerah, Provinsi, Nasional serta dunia usaha, berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan yang terlalu dalam.



**Gambar II-7. Kemiskinan Kota Cilegon**

**TABEL II- 1. Perkembangan Kemiskinan Kota Cilegon**

Kabupaten/Kota		2020	2021	Selisih
Regency/Municipality				
<b>Kabupaten/Regency</b>				
1	Kab Serang	6,72	6,94	0,22
2	Kab Pandeglang	6,72	6,72	0,00
3	Kab Tangerang	6,23	7,52	1,29
4	Kab Lebak	6,24	6,29	0,05
<b>Kota/Municipality</b>				
1	Kota Tangerang Selatan	3,74	3,57	-0,18
2	<b>Kota Cilegon</b>	<b>3,69</b>	<b>4,24</b>	<b>0,55</b>
3	Kota Tangerang	5,22	5,93	0,71
4	Kota Serang	6,00	6,71	0,71
<b>Provinsi Banten</b>		<b>5,92</b>	<b>6,48</b>	<b>0,56</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

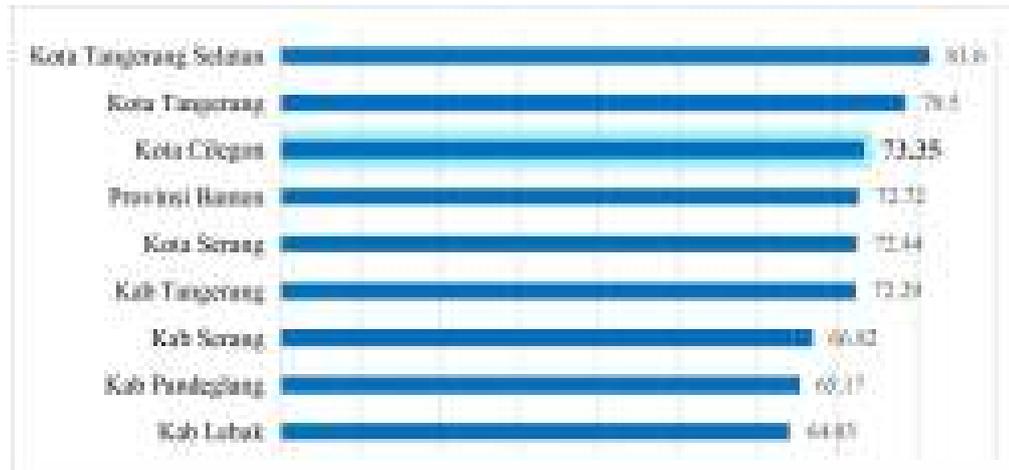
Terkait Indeks Pembangunan Manusia, selama lima tahun terakhir, atau kurun waktu tahun 2016-2021, IPM Kota Cilegon secara konsisten menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2021, pada kondisi pandemi covid-19 masih berlangsung, peningkatan IPM bahkan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, khususnya pada komponen indeks pendidikan.

**TABEL II- 2. Perkembangan Komponen IPM Kota Cilegon Tahun 2017 - 2021**

Indikator/ Variabel	2017	2018	2019	2020	2021
Umur Harapan Hidup Saat lahir (tahun)	66,32	66,43	66,60	66,67	66,69
<b>Indeks angka harapan hidup (poin)</b>	<b>71,26</b>	<b>71,43</b>	<b>71,69</b>	<b>71,73</b>	<b>71,83</b>
Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,12	13,13	13,15	13,16	13,18
Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	9,69	9,73	9,74	9,87	10,08
<b>Indeks pendidikan (poin)</b>	<b>68,74</b>	<b>68,91</b>	<b>68,99</b>	<b>71,31</b>	<b>70,21</b>
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah)	12.562	12.900	13.230	13.010	13,04
<b>Indeks daya beli (poin)</b>	<b>77,11</b>	<b>77,92</b>	<b>78,69</b>	<b>78,18</b>	<b>78,25</b>
<b>IPM Cilegon</b>	<b>72,29</b>	<b>72,65</b>	<b>73,01</b>	<b>73,05</b>	<b>73,35</b>

Sumber : BPS Kota Cilegon

Pada lingkup regional, pencapaian IPM Kota Cilegon menempati urutan ke-3 dan lebih tinggi dari IPM Provinsi Banten.



**Gambar II-8. IPM Kota Cilegon Di Provinsi Banten Tahun 2021**

Sumber : Banten Dalam Angka 2022, diolah

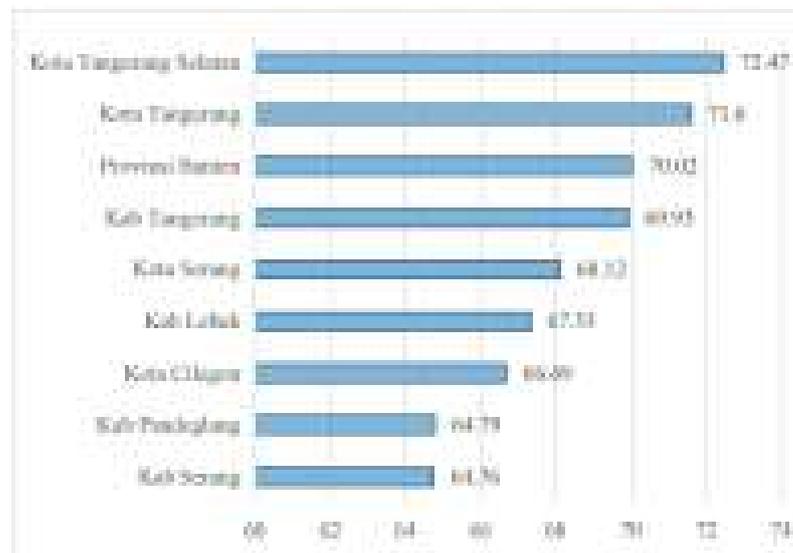
Dalam periode 2016 hingga 2021, Pemerintah Kota Cilegon telah berhasil meningkatkan Umur Harapan Hidup saat lahir selama 0,55 tahun. Adapun Umur Harapan Hidup Kota Cilegon pada tahun 2021 ini, mencapai 66,69 tahun. Dengan demikian, setiap penduduk Kota Cilegon yang lahir pada tahun 2021 dapat berharap untuk hidup sampai usia 66 tahun 8 bulan.



**Gambar II-9. Umur Harapan Hidup (UHH) Kota Cilegon Tahun 2016-2021**

Sumber : BPS Kota Cilegon, diolah

Pada lingkup regional, Umur Harapan Hidup Kota Cilegon saat ini berada dibawah angka UHH Provinsi Banten (70,02 tahun), jika dibandingkan dengan kabupaten/kota yang berada di Provinsi Banten, Kota Cilegon menduduki peringkat ketujuh.

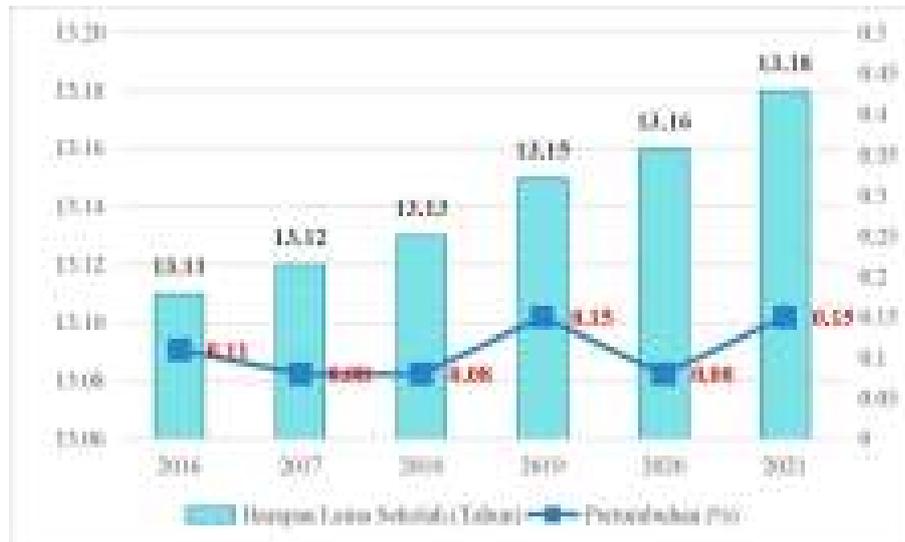


**Gambar II- 10. Capaian Umur Harapan Hidup Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2021**

Sumber : BPS Provinsi Banten

Selama periode 2016 hingga 2021, Harapan Lama Sekolah telah meningkat. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah ini menjadi sinyal bahwa memang ada perbaikan pada sistem pendidikan di Kota Cilegon. Kondisi yang demikian sekaligus juga menjadi penanda dari semakin banyaknya penduduk yang dapat bersekolah. Sayangnya, selama setahun terakhir ini peningkatan jumlah penduduk yang bersekolah, relatif lebih sedikit

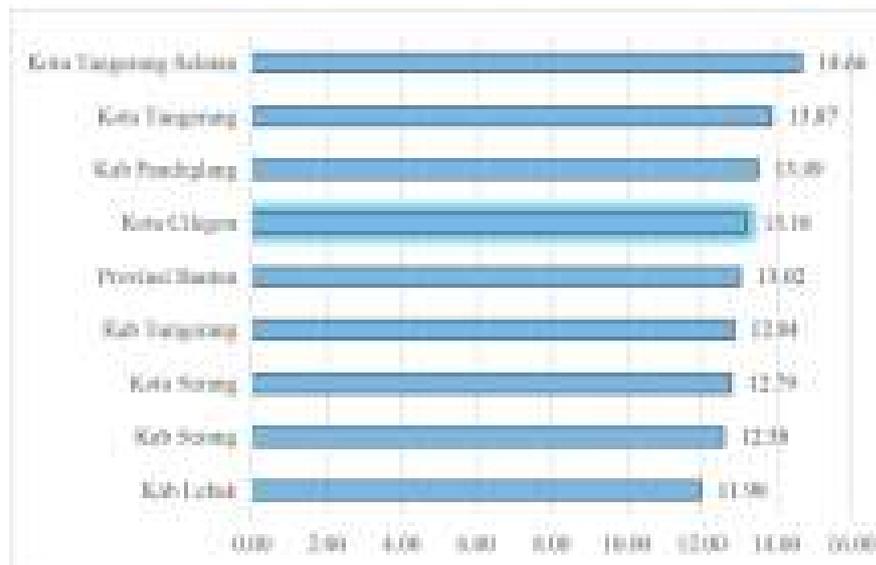
dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun Harapan Lama Sekolah pada tahun 2021 telah mencapai 13,18 tahun. Artinya, bahwa anak-anak yang telah berusia 7 tahun pada tahun 2021, memiliki peluang untuk bersekolah hingga Semester III di perguruan tinggi, atau setidaknya menamatkan pendidikan hingga lulus SLTA.



**Gambar II-11. Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Cilegon Tahun 2016-2021**

Sumber : BPS Kota Cilegon, diolah

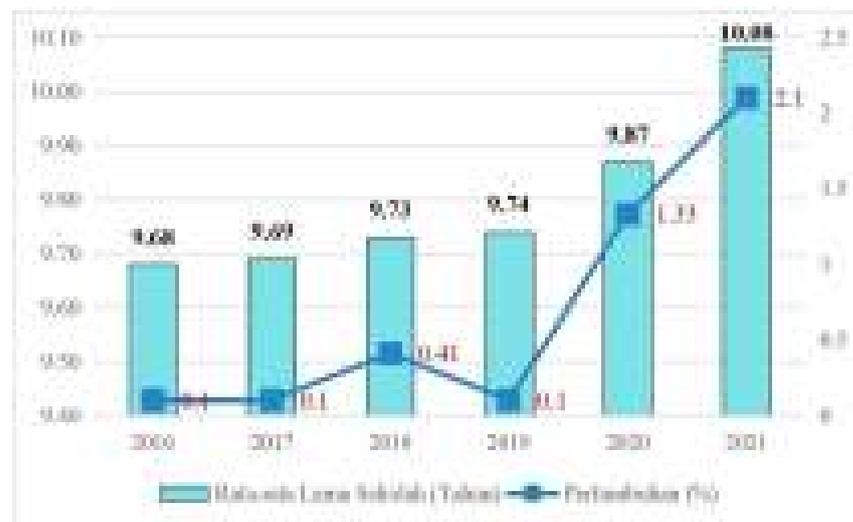
Kondisi Harapan Lama Sekolah saat ini sudah berada di atas angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Banten (13,02 tahun). Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota yang berada di Provinsi Banten, Kota Cilegon menduduki peringkat keempat.



**Gambar II- 12. Capaian Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun 2021**

Sumber : BPS Provinsi Banten

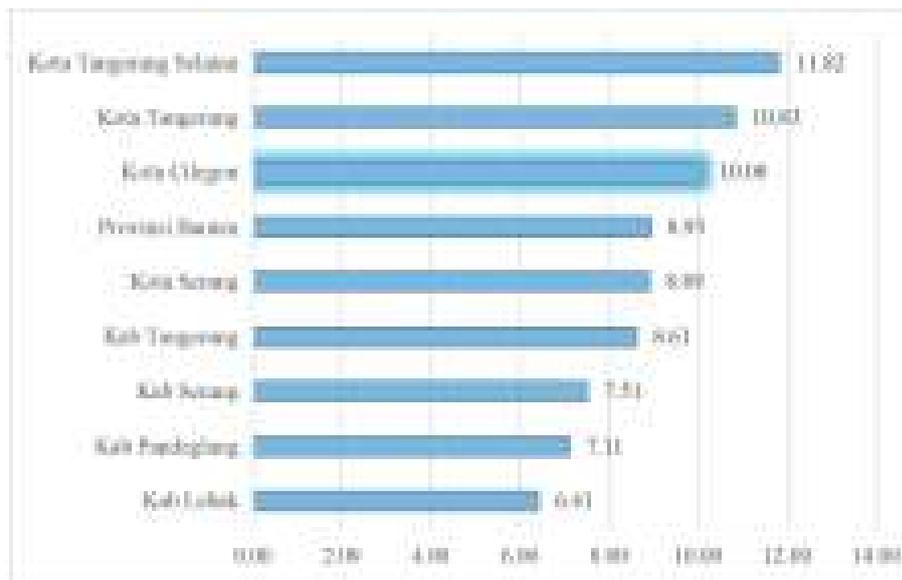
Sementara itu Rata-rata Lama Sekolah di Kota Cilegon pada tahun 2021 telah mencapai 10,08 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk yang berusia 25 tahun ke atas pada tahun 2021 telah mengenyam pendidikan hingga kelas X (SMA kelas I). Selain itu, angka pertumbuhan Rata-rata Lama Sekolah yang selalu positif, menjadi penanda bahwa kualitas pendidikan penduduk Kota Cilegon terus mengalami peningkatan. Bahkan dalam periode setahun terakhir ini, peningkatan kualitas pendidikannya lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya.



**Gambar II-13. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Cilegon Tahun 2016-2021**

Sumber : BPS Kota Cilegon, diolah

Kondisi Rata-rata Lama Sekolah saat ini sudah berada diatas angka Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Banten (8,93 tahun). Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota yang berada di Provinsi Banten, Kota Cilegon menduduki peringkat ketiga.



**Gambar II-14. Capaian Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2021**

Sumber : BPS Provinsi Banten

Pada komponen daya beli atau *purchasing power parity* yang dalam hal ini diukur dari pengeluaran perkapita masyarakat terhadap 96 jenis komoditas, pencapaian di tahun 2021 menunjukkan peningkatan setelah sebelumnya mengalami penurunan yang cukup signifikan imbas dari adanya pandemi covid-19 terhadap perekonomian masyarakat.

Dibandingkan dengan Provinsi Banten, daya beli Kota Cilegon pada tahun 2021 sebesar 13,04 juta per kapita/tahun berada di atas Provinsi Banten yang mencapai 'hanya' Rp 12,03 juta/kapita/tahun dan cukup jauh di atas rata-rata pengeluaran penduduk Indonesia yang 'baru mencapai' Rp 11,15 juta/kapita/tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi penduduk Cilegon lebih baik dari rata-rata provinsi dan nasional.



**Gambar II-15. Perkembangan Daya Beli Masyarakat Cilegon Tahun 2017-2021**

Sumber : BPS Kota Cilegon, diolah

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota yang berada di Provinsi Banten, Kota Cilegon menduduki peringkat keempat.



**Gambar II-16. Capaian Daya Beli Masyarakat Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2021**

Sumber : BPS Kota Cilegon, diolah

Jika dikaitkan dari sisi ketimpangan ekonomi, indeks gini rasio Kota Cilegon di tahun 2021 mencapai 0,363, membaik jika dibandingkan dengan angka rasio gini pada tahun sebelumnya (2020 = 0,373).

**TABEL II-3. Indeks Gini Kota Cilegon dan Daerah Sekitarnya Tahun 2019-2021**

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021
Kabupaten Pandeglang	0,310	0,305	
Kabupaten Lebak	0,297	0,314	
Kabupaten Tangerang	0,325	0,285	
Kabupaten Serang	0,305	0,303	
Kota Tangerang	0,328	0,339	
Kota Cilegon	<b>0,315</b>	<b>0,373</b>	<b>0,363</b>
Kota Serang	0,342	0,352	
Kota Tangerang Selatan	0,331	0,368	

Sumber : Penyusunan Tabel IO dan Indeks Gini Kota Cilegon

Kinerja investasi yang terus meningkat memberikan sinyal positif kondisi perekonomian yang lebih baik pada tahun 2023.

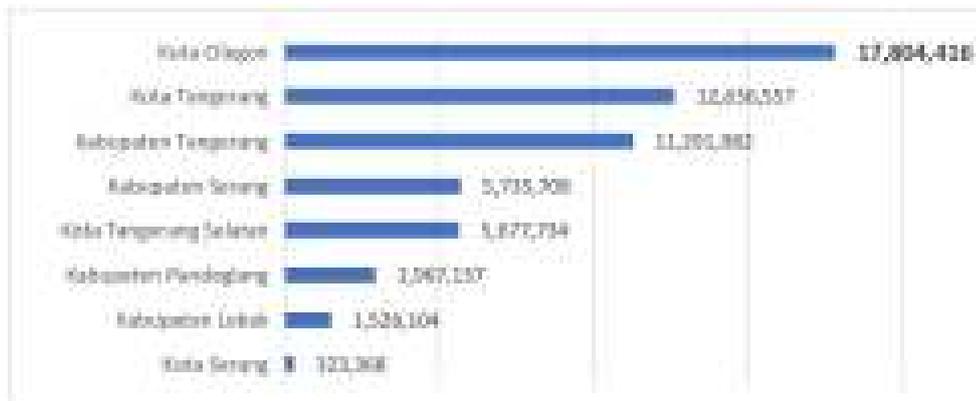
Sepanjang tahun 2021, nilai investasi yang tercatat di Kota Cilegon adalah sebesar Rp. 17.804.416.270.000 (17,8 trilyun rupiah), dengan total laju pertumbuhan sebesar 8,41%, meliputi realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 16.294.877.570.000 (16,29 trilyun) dan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 1.509.538.700.000,00 (1,5 trilyun). Realisasi investasi di Kota Cilegon dalam lima tahun terakhir selalu didominasi oleh penanaman modal oleh perusahaan asing (PMA), terutama dari perusahaan yang bergerak pada sektor industri kimia.



**Gambar II-17. Jumlah Penambahan Investasi PMA & PMDN tahun 2021 (dalam jutaan rupiah)**

Sumber : DPMPTSP Kota Cilegon, 2022

Ditengah pandemi covid-19 yang masih berlangsung di 2021, realisasi investasi di Kota Cilegon masih sangat baik dengan laju total investasi sebesar 8,41%. Realisasi investasi sepanjang tahun 2021 di Kota Cilegon merupakan yang terbesar se-provinsi Banten. Kota Cilegon atas capaian investasi di 2021 mendapatkan penghargaan dari Kementerian Investasi/BKPM di awal 2022. Berdasarkan nilai investasi, pertumbuhan penanaman modal paling besar berasal dari sektor industri kimia dan farmasi, diikuti sektor usaha Listrik, gas & air serta industri logam (sebagian besar didominasi penanaman modal asing).



**Gambar II-18. Perbandingan Realisasi Investasi tahun 2021 di Provinsi Banten**

Sumber : DMPTSP



**Gambar II-19. Laju Peningkatan Investasi Kota Cilegon 2017 -2021**  
Sumber : DPMPSTP Kota Cilegon, diolah

Daya beli masyarakat yang diperkirakan meningkat di tahun 2023 akan mendorong terhadap penurunan inflasi di tahun 2023, dengan meningkatkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Tentunya hal ini harus diiringi dengan adanya kebijakan Pemerintah untuk menjaga stabilitas barang dan jasa.

Sebagai kota basis industri dengan indeks daya beli masyarakat yang tinggi dan Upah Minimum Kerja yang tinggi, Kota Cilegon cenderung mengalami inflasi yang di atas rata-rata nasional dan provinsi dalam 5 tahun terakhir. Di tahun 2021, inflasi lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya (2020).



**Gambar II-20. Perbandingan Inflasi Kota Cilegon dengan Nasional dan Provinsi Banten**  
Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Berdasarkan kelompok pengeluaran, peningkatan indeks harga terbesar *year on year (YoY)* terjadi pada kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga, diikuti oleh pengeluaran makanan, minuman dan tembakau, serta perawatan pribadi dan jasa lainnya. Adapun ada kelompok pengeluaran yang justru mengalami penurunan indeks harga (deflasi) adalah pada kelompok pengeluaran Informasi, komunikasi dan jasa keuangan.



**Gambar II-21. Inflasi Kota Cilegon berdasarkan Kelompok Pengeluaran Tahun 2021 (YoY)**

Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

## II.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan mempunyai fungsi untuk mendorong dan memfasilitasi pembangunan guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang memadai bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dapat menyerap aspirasi dan partisipasi masyarakat lokal sehingga arah pembangunan akan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta dapat menyusun kebijakan keuangan yang tepat dan akurat berdasarkan analisis perkembangan ekonomi daerah.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah bermanfaat dalam pengelolaan dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien. Arah kebijakan keuangan yang tepat akan menghasilkan kondisi keuangan daerah yang semakin meningkat dan kondusif untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan.

Kebijakan keuangan daerah lebih menekankan pada upaya pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah daerah, termasuk juga pembiayaan daerah. Kebijakan ini lebih terkait dengan kebijakan anggaran pemerintah daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan keuangan daerah tersebut dijabarkan lebih lanjut kedalam kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah.



Arah kebijakan keuangan daerah pada tahun 2023 adalah meningkatkan kualitas anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana diatur pada regulasi tentang pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Pada aspek pendapatan, kebijakan pendapatan diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui upaya-upaya peningkatan pendapatan asli daerah, dana transfer serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pada aspek belanja, kebijakan belanja daerah diarahkan pada pengelolaan belanja yang lebih efisien dan efektif dengan berorientasi pada layanan publik dan secara optimal mendukung pencapaian outcome pembangunan Daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pada aspek pembiayaan, kebijakan pembiayaan diarahkan pada pemanfaatan surplus anggaran dan upaya untuk menutup defisit anggaran yang dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.





## BAB III

# ASUMSI DASAR PENYUSUNAN R-APBD 2023

### III.1 Asumsi Dasar yang digunakan RAPBN

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Selain itu penyusunan RKP juga dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 memuat arah kebijakan nasional tahunan demi menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan.

Merujuk kepada Rancangan RKP tahun 2023, tema RKP di tahun 2023 adalah **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** dengan prioritas nasional meliputi :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2023 disusun di tengah pemulihan ekonomi yang semakin menguat. Namun, perekonomian global masih dibayangi risiko ketidakpastian yang dipicu konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang berdampak pada kenaikan harga komoditas energi dan pangan yang signifikan. Di sisi lain, dampak *scarring effect* memicu *supply disruption* yang menimbulkan kenaikan inflasi yang tinggi di beberapa negara.

Berkenaan dengan hal tersebut, respon kebijakan yang ditempuh Pemerintah adalah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi yang sedang terjadi sekaligus juga menjadi momentum untuk melakukan reformasi struktural dalam rangka mendorong transformasi ekonomi untuk peningkatan produktivitas nasional. Reformasi fiskal yang komprehensif akan dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja dan efisiensi, serta keberlanjutan pembiayaan. Adapun asumsi ekonomi makro Nasional sebagai berikut :

1. Pertumbuhan PDB mencapai 5,3 – 5,9%;
2. Rata-rata inflasi sebesar 2,0-4,0%;
3. Rata-rata nilai tukar sebesar Rp. 14.300-14.800 per dolar AS;
4. Suku bunga Surat Utang Negara 10 tahun sebesar 6,32-7,27%;
5. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,3 – 6,0%;
6. Tingkat Kemiskinan sebesar 7 – 8%
7. Rasio Gini sebesar 0,375-0,378 point
8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,29-73,35 point

Pada tahun 2023 arah kebijakan ekonomi makro dan kebijakan fiskal nasional masih berfokus pada upaya-upaya pemulihan ekonomi. Sekaligus upaya reformasi untuk mengatasi masalah fundamental ekonomi jangka menengah panjang, sebagai dampak dari wabah virus corona di tahun 2020.

### III.2 Asumsi Dasar RAPBD Provinsi

Perekonomian provinsi banten dihasilkan dari aktivitas ekonomi diwilayah utara (Kabupaten serang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota serang dan Kota Tangerang selatan) yang tertumpu pada sektor sekunder dan tersier, sedangkan kurang lebih 12,0 persen sisanya dihasilkan oleh aktivitas ekonomi di wilayah selatan (Kabupaten pandeglang dan lebak) yang bertumpu pada sektor primer.

Ketidakmerataan kondisi perekonomian wilayah, dapat diklasifikasikan dalam daerah sangat berkembang (Kabupaten Tangerang (termasuk kota tangsel), dan Kota Tangerang), daerah berkembang (kabupaten serang, dan Kota cilegon), serta daerah sedang berkembang (Kota serang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang).

Ada 4 (empat) kunci sukses untuk memanfaatkan momentum dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten, yaitu :

1. Untuk mendorong konsumen agar tetap kuat dengan menjaga tingkat inflasi yang stabil, rendah, serta mempertahankan penyaluran bansos yang tepat sasaran;
2. Mendorong akselerasi proyek infrastruktur dan pengeluaran pemerintah pada sektor-sektor produktif;
3. Mempercepat pembenahan regulasi perizinan dengan optimalisasi OSS dan peningkatan daya saing dalam upaya menarik investasi ke Provinsi Banten;
4. Bersama pemerintah pusat untuk meningkatkan daya saing industri unggulan yang tercakup dalam Roadmap Indonesia 4.0.

Namun pertumbuhan Ekonomi Banten menghadapi tekanan luar negeri yang cukup berat. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi global pada periode tersebut telah mengalami perlambatan. Demikian pula dengan negara-negara mitra dagang utama Banten, yang juga mengalami perlambatan pertumbuhan. Imbasnya, setelah pada tahun sebelumnya mengalami akselerasi, pada tahun 2023 ini pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten diasumsikan sebagai berikut :

1. IPM sebesar 73,37 Poin
2. LPE sebesar 5,2%



3. Penduduk Miskin sebesar 6,45%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8%
5. Gini Ratio sebesar 0,362 Point

Merujuk kepada RKPDP Provinsi Banten Tahun 2023, tema RKPDP Provinsi Banten Tahun 2023 adalah **“Memperkuat Daya Saing Daerah untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi sebagai Fondasi Tahapan Modernisasi”** dengan prioritas meliputi :

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM
3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

### III.3 Asumsi Dasar RAPBD Kota Cilegon

Berdasarkan analisa terhadap issue strategis dan permasalahan permasalahan pembangunan daerah, tema RKPDP Kota Cilegon di tahun 2023 adalah

***“MENINGKATKAN KUALITAS SDM DAN DAYA SAING EKONOMI MENUJU CILEGON BARU, MODERN DAN BERMARTABAT”***

**Kualitas Sumber Daya Manusia** adalah sumber daya yang memenuhi kriteria kualitas fisik dan kesehatan, kualitas intelektual dan kualitas mental spiritual.

**Daya Saing Ekonomi** menyatakan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional.

**Cilegon Baru** berarti bahwa Pemerintah Kota Cilegon harus menjadi motor bagi masyarakatnya untuk melakukan perbaikan, pembaruan dan peningkatan kualitas.

**Cilegon Modern** berarti bahwa Kota Cilegon diproyeksikan untuk menjadi kota yang adaptif dengan teknologi, memiliki kelengkapan fasilitas umum, tingkat kesejahteraan yang baik dan kepuasan warga yang tinggi.

**Cilegon Bermartabat** berarti bahwa Masyarakat dan Pemerintah Kota Cilegon mampu menerapkan nilai-nilai luhur agama, budaya dan peradaban dalam seluruh aspek pembangunan. Sehingga, menempatkan Kota Cilegon sejajar atau lebih baik dibandingkan kota lainnya.

Berpijak pada kondisi dan tantangan pembangunan sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka prioritas dan agenda pembangunan Kota Cilegon tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Layanan Pemerintahan  
Pemerintah Kota Cilegon berkomitmen untuk menghadirkan pemerintahan yang professional dan akuntabel melalui : Membangun command center, Pelayanan publik satu atap berbasis teknologi,



Menurunkan tingkat korupsi, Peningkatan fasilitas infastruktur, Promosi jabatan berdasarkan prestasi dan kompetensi, Perizinan satu atap, Meningkatkan fasilitas kota yang baik.

2. Peningkatan Kualitas Pendidikan  
Pemerintah Kota Cilegon berkomitmen untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas melalui : Partisipasi lama sekolah 12 tahun, Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, Meningkatkan akreditasi seluruh sekolah, 100% guru SD dan SMP minimal S1, Meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
3. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat  
Pemerintah Kota Cilegon berkomitmen meningkatkan pelayanan kesehatan melalui : Meningkatkan kelas RSUD menjadi kelas A, Menambah dokter dan tenaga medis hingga ke puskesmas, Meningkatkan fasilitas kesehatan, Ambulance gratis, Tunjangan kematian bagi rakyat miskin, Pembiayaan BPJS kesehatan bagi masyarakat miskin, Puskesmas keliling.
4. Peningkatan Kualitas Pembangunan dan Kualitas Hidup Masyarakat (berperadaban)  
Pemerintah Kota Cilegon berkomitmen mewujudkan masyarakat berperadaban melalui : Membangun cilegon kota pariwisata sejarah, budaya dan religius, Membangun visual kota cilegon yang mempesona, Menjamin keamanan, Membangun cilegon sebagai smart city melalui peningkatan layanan SPBE (baik layanan pemerintahan maupun layanan publik) dan perluasan akses internet di seluruh wilayah serta di area publik dengan pengelolaan yang terintegrasi, Membangun masyarakat yang menguasai IPTEK, Membangun masyarakat yang partisipatif, Membangun ruang publik, Membangun fasilitas bagi penyandang difabel.
5. Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat  
Pemerintah Kota Cilegon sebagai kota industri dan jasa, selalu berusaha mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata melalui : Menjamin kebutuhan dasar bagi keluarga miskin, Meningkatkan daya beli masyarakat (UMKM), Menggali potensi ekonomi berbasis budaya dan kearifan lokal bernilai ekspor, Membangun iklim investasi yang kondusif, Menjadikan cilegon kota industri dan jasa.

Prioritas Pembangunan Tahun 2023 yang dijabarkan diatas memiliki fokus prioritas sebagai berikut :

1. Peningkatan Layanan Pemerintahan
  - a. Peningkatan Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN
  - b. Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
  - c. Peningkatan kualitas layanan publik
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan
  - a. Peningkatan Kualitas Pendidikan yang merata
3. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
  - a. Peningkatan Kualitas Layanan dan Peluasan Akses Kesehatan
4. Peningkatan Kualitas Pembangunan dan Kualitas Hidup Masyarakat (berperadaban)



- a. Penyediaan ruang publik yang representatif dan ramah difabel
  - b. Peningkatan kualitas infrastruktur dan visual kota
  - c. Peningkatan destinasi wisata dan pelestarian budaya daerah
  - d. Pemasyarakatan nilai-nilai luhur keagamaan
  - e. Peningkatan mitigasi bencana dan pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup
  - f. Peningkatan budidaya pertanian, nilai tambah produk pertanian serta diversifikasi pangan
  - g. Peningkatan penegakan hukum trantibum dan linmas
  - h. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kewilayahan
  - i. Peningkatan kualitas hidup anak dan perempuan
  - j. Peningkatan daya saing pemuda dan olahraga
5. Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat
- a. Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial
  - b. Peningkatan Ekonomi Pelaku Usaha Mikro Kecil
  - c. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja
  - d. Peningkatan Pendapatan Daerah

Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cilegon Tahun 2023 bila disandingkan dengan tema RKP dan RKPD Provinsi Banten adalah sebagai berikut.

TEMA RKP PUSAT	TEMA RKPD PROVINSI BANTEN	TEMA RKPD KOTA CILEGON
<i>Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi yang Inklusif dan Berkelanjutan</i>	<i>Memperkuat Daya Saing Daerah untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi sebagai Fondasi Tahapan Modernisasi</i>	<i>Meningkatkan Kualitas SDM dan Daya Saing Ekonomi Menuju Cilegon Baru, Modern dan Bermartabat</i>

Tema yang terdapat pada RKP Pusat, RKPD Provinsi Banten dan RKPD Kota Cilegon memiliki sinkronisasi satu sama lain, Tahun 2023 menjadi tahun dimana pemulihan ekonomi menjadi prioritas yang muncul pada tema dengan mengedepankan perubahan yang adaptif terhadap kondisi pasca pandemi.

Sinkronisasi prioritas RKP Pusat, Prioritas RKPD Provinsi Banten dengan RKPD Kota Cilegon Tahun 2023 diuraikan pada tabel dibawah ini.

**TABEL III- 1. Sinkronisasi Prioritas RKP Pusat, RKPD Provinsi Banten dan RKPD Kota Cilegon Tahun 2023**

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI BANTEN	PRIORITAS KOTA CILEGON
1	2	3
1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan	5. Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan	5. Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	2. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	2. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM	3. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan	4. Peningkatan Kualitas Pembangunan dan Kualitas Hidup Masyarakat (berperadaban)
6. Membangun lingkungan hidup,	3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup,	5. Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat
		4. Peningkatan Kualitas Pembangunan



PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI BANTEN	PRIORITAS KOTA CILEGON
1	2	3
ketahanan bencana, dan perubahan iklim	ketahanan bencana dan perubahan iklim	dan Kualitas Hidup Masyarakat (berperadaban)
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik	4. Meningkatkan kualitas Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan	1. Peningkatan Layanan Pemerintahan

Berdasarkan evaluasi terhadap pencapaian indikator makro hingga tahun 2021 serta perkiraan kondisi perekonomian di tahun 2022 dan 2023, proyeksi ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi dalam penyusunan APBD Kota Cilegon tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**TABEL III-2. Proyeksi Ekonomi Makro Kota Cilegon Tahun 2023**

Indikator	Satuan	Proyeksi Ekonomi Makro Tahun 2023
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	73,65
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	4,91
Kemiskinan	%	3,43
Tingkat Pengangguran	%	9,41
Indeks Gini	Poin	0,36





## BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

### IV.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cilegon mengacu pada Undang-undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebijakan peningkatan pendapatan daerah di tahun 2023 adalah melakukan optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang sah dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah, dengan mempertimbangkan efeknya terhadap kondisi sosio-ekonomi masyarakat, yang mana upaya tersebut sedapat mungkin tidak membebani masyarakat, yang dapat memunculkan efek distorsi ekonomi yang kontra produktif.

Pendapatan daerah yang dianggarkan pada APBD tahun 2023 disusun secara terukur dan rasional dan memiliki kepastian serta berdasarkan pada ketentuan peranturan perundang-undangan.

Berpedoman kepada regulasi tentang harmonisasi keuangan Pusat dan Daerah, kebijakan Pendapatan Daerah dilakukan melalui :

1. Restrukturisasi jenis pajak daerah dengan tetap menjaga penerimaan PAD, khususnya yang berbasis konsumsi menjadi pajak barang dan jasa tertentu;  
Sebagaimana diatur pada UU No 1 Tahun 2022, hal ini bertujuan untuk :
  - i. Menyelaraskan objek pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak;
  - ii. Menyederhaakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan pajak;
  - iii. Memudahkan pemantauan pemungutan pajak terintegrasi oleh Daerah;
  - iv. Mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.
2. Penyederhanaan retribusi dari 32 jenis layanan menjadi 18 jenis layanan, yang mana hal ini bertujuan agar retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah adalah retribusi yang dapat dipungut secara efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Rasionalisasi ini juga dalam upaya mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.
3. Perluasan basis pajak melalui penggunaan opsen pajak sebagai penggantian skema bagi hasil tanpa menambah beban wajib pajak.
4. Peninjauan kembali tarif Pajak Daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi Daerah.

5. Peningkatan kinerja daerah untuk mendorong peningkatan alokasi dana transfer keuangan daerah baik terkait dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus maupun dana insentif daerah.

#### IV.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Target pendapatan daerah tahun 2023 yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana pada tabel berikut :

**TABEL IV-1. Target Pendapatan Daerah Kota Cilegon Tahun 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>824.718.683.318</b>
4.1.01	Pajak Daerah	653.417.599.461
4.1.02	Retribusi Daerah	19.811.404.436
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.833.032.263
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	133.656.647.158
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.183.960.102.253</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.031.790.102.253
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	152.170.000.000
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>42.145.300.000</b>
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	42.145.300.000
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2.050.824.085.571</b>



## BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

### V.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Kebijakan belanja daerah merupakan kebijakan yang mengatur tentang kewajiban-kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Kebijakan ini digunakan dalam rangka mengatur pendanaan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam upaya meningkatkan kualitas belanja daerah yang efisien, produktif dan akuntabel, kebijakan belanja dilakukan melalui :

1. Meningkatkan kualitas penganggaran belanja daerah melalui pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan berbasis kinerja;
2. Meningkatkan sinkronisasi program melalui pengalokasian belanja daerah untuk prioritas pembangunan, pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, serta berdasarkan target kinerja dan skala prioritas;
3. Meningkatkan standardisasi belanja daerah melalui penerapan standar unit cost belanja dan analisis standar belanja;
4. Optimalisasi penggunaan SILPA berbasis kinerja.

### V.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga pada tahun 2023 sebagaimana pada tabel berikut :

**TABEL V- 1. Rencana Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5	<b>BELANJA</b>	
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.848.653.415.870</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	909.848.845.241
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	863.520.469.162
5.1.05	Belanja Hibah	62.674.551.500
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	12.609.549.967
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>282.030.736.059</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	62.516.253.555



5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.629.145.864
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	116.304.588.390
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	56.868.407.150
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.712.341.100
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>10.000.000.000</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.140.684.151.929</b>





## BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan pembiayaan daerah merupakan kebijakan yang mengatur semua penerimaan daerah yang perlu dibayar kembali dan/atau semua pengeluaran daerah yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran yang berikutnya. Selain itu, arah kebijakan ini juga mengatur transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran daerah yang disebabkan oleh lebih kecilnya pendapatan yang diperoleh dibandingkan dengan belanja daerah yang harus dipenuhi akibat kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat.

### VI.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah dilaksanakan melalui :

1. Penganggaran SILPA berdasarkan pertimbangan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran 2021 dan dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran tahun anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan, yang bersumber dari :
  - 1) pelampauan penerimaan PAD;
  - 2) pelampauan penerimaan pendapatan transfer
  - 3) pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
  - 4) pelampauan penerimaan pembiayaan;
  - 5) penghematan belanja;
  - 6) kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
  - 7) sisa dana akibat tidak tercapainya target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan
2. Pencairan dana cadangan sesuai dengan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan

### VI.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah dilaksanakan melalui :

1. Investasi daerah dalam bentuk penyertaan modal atau investasi lainnya yang pengalokasiannya didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan mempedomani peraturan perundangan
2. Pembentukan dana cadangan untuk penyelenggaraan Pemilukada serentak tahun 2024.

**TABEL VI- 1. Rencana Pembiayaan Daerah Kota Cilegon Tahun 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
6	PEMBIAYAAN	



<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>101.860.066.358</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	101.860.066.358
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>101.860.066.358</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>12.000.000.000</b>
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	2.000.000.000
<b>Kode</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>12.000.000.000</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>89.860.066.358</b>

Adapun ringkasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

**TABEL VI-2. Ringkasan RAPBD Kota Cilegon Tahun 2023**

<b>Kode</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>824.718.683.318</b>
4.1.01	Pajak Daerah	653.417.599.461
4.1.02	Retribusi Daerah	19.811.404.436
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.833.032.263
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	133.656.647.158
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.183.960.102.253</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.031.790.102.253
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	152.170.000.000
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>42.145.300.000</b>
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	42.145.300.000
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2.050.824.085.571</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.848.653.415.870</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	909.848.845.241
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	863.520.469.162
5.1.05	Belanja Hibah	62.674.551.500
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	12.609.549.967
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>282.030.736.059</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	62.516.253.555



5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.629.145.864
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	116.304.588.390
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	56.868.407.150
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.712.341.100
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>10.000.000.000</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.140.684.151.929</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(89.860.066.358)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>101.860.066.358</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	101.860.066.358
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>101.860.066.358</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>12.000.000.000</b>
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	2.000.000.000
<b>Kode</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>12.000.000.000</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>89.860.066.358</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL APBD</b>	<b>2.152.684.151.929</b>



## BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

Pencapaian rencana pendapatan dan belanja tahun 2023 tersebut dilakukan melalui beberapa strategi yang merupakan penjabaran dari 5 misi pembangunan daerah, sebagaimana tercantum pada RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021-2026.

Rumusan Tujuan, Strategi dan Arah Kebijakan pada tahun 2023 pada masing-masing misi pembangunan sebagaimana dicantumkan pada tabel berikut :

### VII.1. Strategi pada Misi 1 Menghadirkan Pemerintahan Daerah Yang Profesional Dan Akuntabel

Pencapaian strategi pada misi Menghadirkan Pemerintahan Daerah yang Profesional dan Akuntabel dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

**TABEL VII- 1. Strategi dan Arah Kebijakan Misi 1 Menghadirkan Pemerintahan Daerah Yang Profesional Dan Akuntabel**

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	2023
1.	Peningkatan Kualitas Layanan Pemerintahan	1.1. Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan profesionalitas aparatur	1.1.1. Meningkatkan tata kelola administrasi kependudukan	1.1.1.1. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan serta integrasi system administrasi kependudukan	Peningkatan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
					Peningkatan edukasi masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukanl
					Peningkatan penerapan regulasi tentang sanksi/insentif kepemilikan dokumen kependudukan



NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	2023
					Peningkatan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta penyediaan profil kependudukan
			1.1.2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1.1.2.1. Pengintegrasian layanan dalam satu atap, mengelola pengaduan secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan serta mengukur kepuasan masyarakat secara berkala beserta tindak lanjutnya	Penyelenggaraan pelayanan publik satu pintu yang ditunja oleh penguatan regulasi, tata kelola, sarana prasarana pelayanan
					Pengelolaan pengaduan secara terpadu, tindak lanjut hasil penilaian kepuasan masyarakat secara menyeluruh serta mendorong peningkatan inovasi pelayanan
				1.1.2.2. Peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat kewilayahan, koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, serta efektifitas pelayanan kepada masyarakat di tingkat kewilayahan	Peningkatan kualitas pengelolaan administrasi kewilayahan
				1.1.2.3. Peningkatan pelayanan publik dan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Integrasi sistem informasi layanan pemerintahan, integrasi layanan aduan, peningkatan layanan jaringan SPBE, peningkatan layanan pusat data





NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	2023
					Peningkatan inovasi pelayanan publik di tingkat kewilayahan, pengelolaan pengaduan secara terpadu, serta tindaklanjut hasil penilaian kepuasan masyarakat secara menyeluruh
			1.1.3. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, informasi pembangunan, serta inovasi daerah.	1.1.3.1. Peningkatan kualitas dan sinkronisasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kebijakan, kualitas data dan informasi pembangunan serta sistem akuntabilitas kinerja pemerintah	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan kualitas pengendalian pembangunan, serta pembangunan Satu Data Pembangunan Daerah
				1.1.3.2. Peningkatan sinergitas penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah serta penciptaan, pengembangan dan pelembagaan inovasi pelayanan publik	Peningkatan sinergitas penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah serta penciptaan, pengembangan dan pelembagaan inovasi pelayanan publik
					Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan
					Peningkatan fasilitasi penyusunan program pembangunan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan





NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	2023
			1.1.4. Meningkatkan penataan peraturan perundangan	1.1.4.1. Peningkatan pelayanan, publikasi dan pengendalian penyusunan produk hukum daerah	Peningkatan pelayanan, publikasi dan pengendalian penyusunan produk hukum daerah
			1.1.5. Meningkatkan sistem manajemen aparatur	1.1.5.1. Peningkatan penempatan aparatur berbasis kompetensi, budaya kerja aparatur, serta penyelenggaraan reward and punishment berbasis kinerja	Peningkatan Peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan pegawai, promosi dan mutasi berdasarkan prestasi dan kompetensi (hasil assessment), integrasi sistem informasi kepegawaian, pemberian TPP berdasarkan kinerja
					Peningkatan pelaksanaan assessment dan pemenuhan kebutuhan diklat teknis pengembangan kompetensi
			1.1.6. Menata kelembagaan/or ganisasi pemerintah daerah serta peningkatan manajemen kinerja pemerintah daerah	1.1.6.1. Penataan struktur kelembagaan dan manajemen kinerja pemerintah daerah	Evaluasi kelembagaan serta melakukan percepatan proses penyederhanaan birokrasi
					Peningkatan manajemen kinerja berbasis teknologi informasi serta penerapan <i>reward dan punishment</i> berbasis pencapaian kinerja





NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	2023
			1.1.7. Meningkatkan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Walikota dan Wakil Walikota	1.1.7.1. Peningkatan fasilitasi Walikota dan Wakil Walikota dalam menjalankan tugas dan fungsi pimpinan daerah	Peningkatan fasilitasi Walikota dan Wakil Walikota dalam menjalankan tugas dan fungsi pimpinan daerah
			1.1.8. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, asset, arsip daerah dan pengadaan barang jasa	1.1.8.1. Peningkatan kualitas pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, pengelolaan keuangan dan asset serta pengelolaan arsip daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik
					Peningkatan manajemen asset daerah melalui sistem informasi asset dan keuangan yang terintegrasi; sertifikasi, penertiban dan penyelamatan asset daerah dan optimalisasi pemanfaatan asset daerah
					Peningkatan manajemen arsip berbasis teknologi informasi
				1.1.8.2. Peningkatan manajemen sdm, asset, keuangan, perencanaan, informasi dan kearsipan di tingkat perangkat daerah	Peningkatan pengelolaan sdm, asset, keuangan, perencanaan, informasi dan kearsipan di tingkat perangkat daerah
				1.1.8.3. Peningkatan kualitas perencanaan, pendataan, pengelolaan, pengawasan dan pelaporan retribusi daerah	Peningkatan kualitas perencanaan, pendataan, pengawasan dan pelaporan retribusi serta peningkatan elektronifikasi pengelolaan retribusi daerah





NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	2023
			1.1.9. Meningkatkan kualitas pengawasan pembangunan	1.1.9.1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi APIP serta peningkatan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Peningkatan kapasitas dan kompetensi APIP serta peningkatan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
				1.1.9.2. Peningkatan kinerja pengawasan internal, pengendalian dan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi dan kualitas SDM Jasa konstruksi	Peningkatan kinerja pengawasan internal, pengendalian dan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi dan kualitas SDM Jasa konstruksi
			1.1.10. Meningkatkan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	1.1.10.1. Peningkatan fasilitasi DPRD dalam menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD, penganggaran dan pengawasan pembangunan serta tugas DPRD lainnya	Peningkatan fasilitasi DPRD dalam menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD, penganggaran dan pengawasan pembangunan serta tugas DPRD lainnya



## VII.2. Strategi pada Misi 2 Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas

Pencapaian sasaran pada misi Mewujudkan Pendidikan Yang Berkualitas dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

**TABEL VII- 2. Strategi dan Arah Kebijakan Misi 2 Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas**

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	2023
1.	Peningkatan Kualitas Pendidikan	1.1. Terwujudnya Kualitas Pendidikan Yang Merata	1.1.1. Meningkatkan pengelolaan sistem pendidikan daerah	Peningkatan pemerataan akses pendidikan, penjaminan mutu pendidikan dan pemantapan strategi pembiayaan peningkatan efektifitas pemanfaatan anggaran pendidikan anak usia dini, pendidikan sekolah dasar dan pendidikan non formal/kesetaraan	Peningkatan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah
					Peningkatan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah serta peningkatan akreditasi sekolah
					Peningkatan prestasi siswa ataupun tenaga pendidik dalam kegiatan/ajang lomba pendidikan prestasi
			Mengharmonisasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam kurikulum pendidikan	Pengembangan kurikulum muatan lokal	Peningkatan standar kurikulum pendidikan yang memasukkan unsur muatan lokal sesuai karakter Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	2023
			Meningkatkan pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan kompetensi, sertifikasi dan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan, serta pendistribusian tenaga pendidik dan kependidikan secara merata	Peningkatan kompetensi, sertifikasi dan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan, serta pendistribusian tenaga pendidik dan kependidikan secara merata
			Meningkatkan pengendalian perizinan pendidikan	Pengendalian ijin pendirian satuan pendidikan baru yang tidak sesuai kebutuhan dan tidak memenuhi standar mutu	Pengendalian ijin pendirian satuan pendidikan baru yang tidak sesuai kebutuhan dan tidak memenuhi standar mutu
		Meningkatnya Kompetensi Literasi Masyarakat	Peningkatan literasi berbasis perpustakaan	Peningkatan layanan perpustakaan serta peningkatan inovasi dan kemitraan dalam gerakan gemar membaca	Peningkatan layanan perpustakaan serta peningkatan inovasi dan kemitraan dalam gerakan gemar membaca

### VII.3. Strategi pada Misi 3 Meningkatkan Pelayanan Kesehatan

Pencapaian sasaran pada misi Meningkatkan Pelayanan Kesehatan dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

**TABEL VII-3. Strategi dan Arah Kebijakan Misi 3 Meningkatkan Pelayanan Kesehatan**

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	2023
1.	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Individu	Meningkatkan pengelolaan kesehatan masyarakat dan individu menuju cakupan kesehatan semesta	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang ditunjang dengan fasilitas, utilitas dan SDM yang handal	Peningkatan kualitas pelayanan Rumah Sakit ditunjang dengan fasilitas, utilitas dan SDM yang handal
					Peningkatan kualitas pelayanan puskesmas yang ditunjang dengan fasilitas, utilitas dan SDM yang handal

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	2023
					Perluasan cakupan jaminan kesehatan nasional menuju kesehatan semesta
			Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Peningkatan kompetensi sumber daya kesehatan serta pendistribusian tenaga kesehatan secara merata	Peningkatan kompetensi sumber daya kesehatan serta pendistribusian tenaga kesehatan secara merata
			Meningkatkan pemenuhan obat dan perbekalan kesehatan serta pengawasan obat dan pangan berisiko	1.1.3.1. Pemenuhan obat dan perbekalan kesehatan, perluasan cakupan dan kualitas pengawasan obat dan pangan berisiko serta penguatan laboratorium kesehatan	Pemenuhan obat dan perbekalan kesehatan, perluasan cakupan dan kualitas pengawasan obat dan pangan berisiko
			Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan	Peningkatan dukungan lintas sektor dalam penyelenggaraan kesehatan	Peningkatan peran kader kesehatan dalam komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan masyarakat

#### VII.4. Strategi pada Misi 4 Mewujudkan Kesejahteraan yang Merata

Pencapaian sasaran pada misi Mewujudkan Kesejahteraan Yang Merata dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

**TABEL VII- 4. Strategi dan Arah Kebijakan Misi 4 Mewujudkan Kesejahteraan yang Merata**

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	2023
1.	Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Berkurangnya Kesenjangan Sosial Ekonomi Masyarakat	Mengoptimalkan sistem kesejahteraan sosial masyarakat	Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial masyarakat miskin dan korban bencana alam serta optimalisasi	Perlindungan dan jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang tidak mampu



				sistem pendataan program kesejahteraan sosial secara terintegrasi	
					Perlindungan dan jaminan sosial bagi anak terlantar
					Perlindungan sosial bagi korban bencana dan sosial
					Optimalisasi sistem pengelolaan data program kesejahteraan sosial secara terintegrasi
				Peningkatan upaya rehabilitasi sosial yang berkelanjutan	Rehabilitasi sosial dasar PMKS dengan prioritas pada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti
					Penyediaan layanan data, kedaruratan dan pengaduan
				Peningkatan kualitas pemberdayaan sosial melalui penguatan institusi	Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial melalui pelaksanaan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dengan prioritas pada penguatan peran unit-unit puskesmas
		Meningkatnya Kesempatan Kerja	Integrasi program dan pendampingan yang berkelanjutan dalam pemberdayaan usaha mikro kecil	Peningkatan kualitas pendataan, perencanaan dan evaluasi program pemberdayaan UMK	Peningkatan kualitas pendataan, perencanaan program pemberdayaan dan evaluasi program pemberdayaan UMK melalui optimalisasi sistem database UMK
					Peningkatan evaluasi program pemberdayaan UMK





				Peningkatan kualitas produk, kapasitas produksi, akses pemasaran dan kapasitas kelembagaan UMK	Peningkatan fasilitasi usaha pelaku usaha mikro kecil meliputi konsultasi bisnis, pendampingan atau inkubasi usaha, promosi, fasilitasi akses pembiayaan, pelatihan bisnis, jaringan kerjasama usaha serta layanan informasi usaha
				Peningkatan kemitraan antar pelaku usaha	Peningkatan kemitraan UMK dengan usaha retail modern serta pengembangan kampung UMK
			Meningkatkan kualitas koperasi	Peningkatan pendampingan dan pemberdayaan koperasi dalam perekonomian daerah	Peningkatan pendampingan koperasi melalui pendidikan dan pelatihan perkoperasian serta penilaian koperasi sehat
					Pengembangan koperasi syariah berbasis pesantren dan lembaga keagamaan
			Mengembangkan sentra-sentra industri kecil sebagai bagian dari pembangunan industri nasional	Peningkatan perencanaan, evaluasi, pengendalian dan pengelolaan sistem informasi industri nasional	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK)
					Peningkatan pengendalian dan evaluasi kepatuhan industri dalam penyampaian data ke sistem informasi industri nasional
					Peningkatan pengelolaan sistem informasi industri nasional dengan prioritas pada pemutakhiran data





			Meningkatkan pengelolaan angkatan dan tenaga kerja daerah	Peningkatan kualitas layanan informasi ketenagakerjaan	Peningkatan layanan informasi ketenagakerjaan
				Peningkatan dukungan sarpras, kurikulum pelatihan, sertifikasi pelatihan serta pemagangan	Peningkatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi serta fasilitasi pemagangan pada perusahaan
					Pembinaan lembaga pelatihan kerja
					Peningkatan sarana dan prasarana UPT Latihan Kerja
				Peningkatan kualitas hubungan industrial	Peningkatan kualitas hubungan industrial difokuskan pada pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial
		Meningkatnya Investasi dan Pendapatan Daerah	1.3.1. Mengintegrasikan layanan perijinan dan investasi	1.3.1.1. Pengintegrasian layanan perijinan, investasi, dan layanan aduan	Peningkatan layanan perijinan dan non perijinan serta pengelolaan data dan informasi secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal
					Pemberian insentif/fasilitasi kemudahan berusaha penanaman modal
			1.3.2. Optimalisasi potensi pendapatan daerah	1.3.2.1. Pengoptimalisasikan kualitas layanan pendapatan daerah serta peningkatan kerjasama lintas sektor dalam peningkatan pendapatan daerah	Optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah dengan prioritas pada regulasi, perluasan elektronifikasi pajak dan retribusi daerah



					Peningkatan investasi daerah dengan prioritas pada sektor pengelolaan limbah industri, perdagangan dan keuangan
					Mendorong percepatan Kerjasama Swasta dalam pembangunan Pelabuhan Warnasari melalui pendekatan politis, dukungan regulasi dan perijinan serta peningkatan tata kelola manajemen
				1.3.2.2. Pendayagunaan aset daerah	Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan aset daerah
					Peningkatan kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha/Swasta dalam optimalisasi pemanfaatan aset daerah

### VII.5. Strategi pada Misi 5 Mewujudkan Masyarakat Berperadaban

Pencapaian sasaran pada misi Mewujudkan Masyarakat Berperadaban dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

**TABEL VII- 5. Strategi dan Arah Kebijakan Misi 5 Mewujudkan Masyarakat Berperadaban**

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	2023
1.	Peningkatan Kualitas Pembangunan dan Kualitas Hidup Masyarakat	Meningkatnya kualitas penataan ruang, infrastruktur Kota, prasarana, sarana dan utilitas permukiman	Menguatkan regulasi instrumen pengendalian ruang dan Penegakan Hukum	Peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, sistem informasi, pola insentif disinsentif/sanksi, kapasitas dan kualitas penataan Ruang	Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang dengan fokus pada penyusunan RRTR serta koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang



NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	2023
				serta peran masyarakat dalam penataan ruang	
					Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang dengan prioritas pada penyediaan ruang terbuka publik yang representatif dan ramah difabel serta penyediaan fasilitas hobi
			Meningkatkan konektivitas dan pelayanan transportasi	Peningkatan kinerja jaringan jalan dan transportasi	Peningkatan kualitas dan kualitas jalan dengan prioritas pada pembangunan JLU, peningkatan jalan penghubung tingkat kecamatan dan kelurahan, jalan akses ke lokasi wisata, KPT serta jalur evakuasi dan mitigasi bencana
					Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung perhubungan (perengkapan jalan, halte, pju dsb nya) serta melakukan kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha/Swasta dalam pengelolaan Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM)





NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	2023
			Meningkatkan prasarana dan sarana utilitas permukiman	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan prasarana dan sarana permukiman	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan penyediaan PSU
				Peningkatan ruang publik yang representatif dan ramah difabel	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan penyediaan PSU
			Meningkatkan tata kelola kelembagaan dan kapasitas penyelenggara SPAM dalam penyediaan air minum yang layak dan aman	Peningkatan kapasitas penyelenggara air minum dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan SPAM melalui penyusunan regulasi dan dokumen perencanaan penyediaan air minum yang terintegrasi, penguatan kemitraan dan peran pemerintah, dan penyediaan infrastruktur/sarpr as air minum	Pengelolaan dan pengembangan SPAM melalui jaringan perpipaan
			Penguatan regulasi, tata kelola kelembagaan, dan infrastruktur pengelolaan air limbah yang terintegrasi	Penyusunan regulasi dan dokumen perencanaan tentang pengelolaan limbah domestik serta pembentukan lembaga pengelola air limbah domestik dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan limbah domestik	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik
			Meningkatkan kualitas tata kelola perdagangan	Peningkatan kualitas sarana perdagangan	Peningkatan kualitas pengelolaan sarana distribusi perdagangan menuju pasar rakyat ber-SNI





NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	2023
		Meningkatnya pelestarian budaya, dan destinasi wisata	Mengelola objek daya tarik wisata daerah	Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam pengembangan ODTW secara berkelanjutan	Peningkatan koordinasi dalam pengembangan ODTW dengan prioritas pada penataan Destinasi Wisata yaitu Camping Ground, Situ Rawa Arum, wisata pantai (Merak Beach) serta wisata religi
			Meningkatkan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Peningkatan penyelenggaraan event-event kreatif termasuk di dalamnya event-event budaya dan kesenian tradisional	Peningkatan penyelenggaraan event-event kreatif dengan prioritas pada penyelenggaraan festival seni budaya dan fasilitasi pelaku seni budaya
				Peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif
			Meningkatkan pengembangan kebudayaan, pelestarian kesenian dan sejarah daerah	Pengelolaan kesenian dan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota
					Pengembangan kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota
				Peningkatan akses informasi sejarah	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah
				Pelestarian dan Pengelolaan cagar budaya	Pelestarian dan Pengelolaan cagar budaya





NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	2023
		Terwujudnya Stabilitas pangan, Ketangguhan bencana, kondusifitas wilayah, kerukunan umat beragama, dan nilai-nilai luhur keagamaan	Meningkatkan budidaya pertanian yang kebutuhan airnya rendah	Peningkatan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian	Peningkatan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
					Peningkatan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
				Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
			Meningkatkan perlindungan konsumen	Menjamin stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Pemantauan dan pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
			Meningkatkan nilai tambah produk pertanian (pertanian, peternakan, perikanan)	Peningkatan penyuluhan dan pengembangan iklim inovasi teknologi pertanian yang berkelanjutan	Peningkatan penyuluhan dan pengembangan iklim inovasi teknologi pertanian yang berkelanjutan
				Peningkatan pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya	Peningkatan pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya
				1.3.2.3. Peningkatan nilai tambah produk perikanan	Peningkatan nilai tambah produk perikanan





NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	2023
				Peningkatan pengelolaan usaha peternakan	Peningkatan pengawasan pelaksanaan izin usaha fasilitas pemeliharaan hewan, izin usaha rumah sakit hewan/pasar hewan dan izin usaha rumah potong hewan
			Meningkatkan diversifikasi pangan	Peningkatan diversifikasi dan pengawasan keamanan pangan	Peningkatan diversifikasi pangan
					Peningkatan pengawasan keamanan pangan
			Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Peningkatan sistem drainase perkotaan dan sungai dalam daerah	Pembangunan dan peningkatan sistem drainase perkotaan sungai
			Menguatkan regulasi, SDM dan tata kelola, perencanaan, pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup	Penyediaan dokumen analisis kinerja jasa lingkungan	Penetapan, pelaksanaan dan pengendalian Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) serta penyediaan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)
				Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
				Penguatan peran pemerintah dan masyarakat dalam pengurangan sampah	Peningkatan pengelolaan dan pengurangan persampahan





NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	2023
			Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap izin lingkungan	Penguatan SDM, pengoptimalan pengawasan dan penegakan hukum terkait izin lingkungan	Optimalisasi Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
			Menguatkan mitigasi perubahan iklim dan penanggulangan bencana untuk mengurangi risiko perubahan iklim dan bencana	Peningkatan fungsi pusdalop, pengembangan sistem informasi, penyelenggaraan diklat dan logistik, penguatan regulasi, tata kelembagaan dan kemitraan masyarakat, serta sarana prasarana mitigasi dan penanggulangan bencana demi peningkatan ketangguhan aparatur dan masyarakat dalam pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat bencana	Optimalisasi pelayanan pencegahan, kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana
				Peningkatan kapasitas SDM dan tata kelola pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	Peningkatan kapasitas SDM dan tata kelola pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran
				Peningkatan kapasitas SDM dan tata kelola pencegahan dan penanggulangan bencana pangan dan pertanian	Peningkatan kapasitas SDM dan tata kelola pencegahan dan penanggulangan bencana pangan dan pertanian
			Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pengendali bencana	Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dan Penanggulangan Bencana	Peningkatan sarana prasara penanggulangan bencana, penyediaan jalur evakuasi dan mitigasi bencana, pemasangan rambu dan sistem peringatan dini serta penyediaan





NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	2023
					tempat evakuasi bencana sementara dengan fasilitas pendukungnya
				Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana	Peningkatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
			Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Perumusan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan terkait pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Perumusan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan terkait pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
			Meningkatkan kualitas layanan trantibum	Peningkatan koordinasi lintas sektoral dalam peningkatan ketentraman dan ketertiban daerah	Peningkatan koordinasi lintas sektoral dalam peningkatan ketentraman dan ketertiban daerah
				Peningkatan sinergitas dengan instansi vertikal, tomas dan toga dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kewilayahan	Peningkatan sinergitas dengan instansi vertikal, tomas dan toga dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kewilayahan
			Menguatkan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan serta meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan serta peningkatan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan serta peningkatan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya





NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	2023
			Meningkatkan peran partai politik dan lembaga pendidikan dalam pengembangan budaya politik	Perumusan, pelaksanaan dan Pemantauan kebijakan di bidang pendidikan poliitk, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi partai politik, pemilukada serta situasi politik	Perumusan, pelaksanaan dan Pemantauan kebijakan di bidang pendidikan poliitk, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi partai politik, pemilukada serta situasi politik
			Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Perumusan, pelaksanaan dan Pemantauan kebijakan terkait dengan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Perumusan, pelaksanaan dan Pemantauan kebijakan terkait dengan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
			Meningkatkan kewaspadaan nasional dan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik	Perumusan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan terkait kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Perumusan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan terkait kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Peningkatan kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan	Peningkatan kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan	Peningkatan kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di tingkat kewilayahan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana lokal	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana lokal
				Peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan melalui program-program di bidang ekonomi dan sosial, dalam upaya mendukung pencapaian sasaran program pembangunan	Peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan melalui program-program di bidang ekonomi dan sosial, dalam upaya mendukung pencapaian sasaran program pembangunan





NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	2023
				Peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan melalui program-program di bidang ekonomi dan sosial, dalam upaya mendukung pencapaian sasaran program pembangunan	Peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan melalui program-program di bidang ekonomi dan sosial, dalam upaya mendukung pencapaian sasaran program pembangunan
					Peningkatan fasilitasi program lembaga-lembaga keagamaan dan penggerak kegiatan keagamaan di tingkat wilayah
		Meningkatnya kualitas hidup perempuan, anak, pemuda dan olahraga	1.5.1. Meningkatkan kualitas olahraga prestasi	1.5.1.1. Peningkatan kualitas pembinaan dan penghargaan atlet olahraga prestasi, penyelenggaraan event olahraga prestasi, serta pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dan organisasi olahraga prestasi	Peningkatan kualitas pembinaan dan penghargaan atlet olahraga prestasi, penyelenggaraan event olahraga prestasi, serta pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dan organisasi olahraga prestasi
			1.5.2. Meningkatkan kapasitas daya saing kepemudaan	1.5.2.1. Peningkatan pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor	Peningkatan pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor
				1.5.2.2. Peningkatan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan	Peningkatan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan
			1.5.3. Meningkatkan kapasitas daya saing kepemudaan	1.5.3.1. Peningkatan pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor	Peningkatan Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula, dan





NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	2023
					Pemuda Kader
				1.5.3.2. Peningkatan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan	Peningkatan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan
			1.5.4. Meningkatkan kapasitas kepramukaan	1.5.4.1. Peningkatan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	Peningkatan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan
			1.5.5. Meningkatkan kualitas keluarga berencana	1.5.5.1. Peningkatan layanan Keluarga Berencana	Peningkatan layanan Keluarga Berencana
			1.5.6. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	1.5.6.1. Peningkatan kualitas keluarga melalui peningkatan peran serta ormas dalam ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta usaha lainnya	Peningkatan kualitas keluarga melalui peningkatan peran serta ormas dalam ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta usaha lainnya melalui penguatan kebijakan daerah
			1.5.7. Meningkatkan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	1.5.7.1. Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam implementasi pengarusutamaan responsif gender	Peningkatan koordinasi dalam implementasi pengarusutamaan responsif gender
				1.5.7.2. Peningkatan Pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Peningkatan Pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi
				1.5.7.3. Peningkatan peran kelembagaan perempuan dalam pemberdayaan perempuan	Peningkatan peran kelembagaan perempuan dalam pemberdayaan perempuan



NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	2023
			1.5.8. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak	1.5.8.1. Peningkatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan serta upaya pencegahan dan penanganan terhadap perempuan korban kekerasan	Peningkatan perlindungan perempuan melalui pencegahan kekerasan terhadap perempuan serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan
				1.5.8.2. Peningkatan upaya pencegahan dan penanganan terhadap anak korban kekerasan dan pemenuhan hak anak	Peningkatan upaya pencegahan dan penanganan terhadap anak korban kekerasan dan pemenuhan hak anak
				1.5.8.3. Peningkatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan anak	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan anak

## VII.6. Strategi dan Arah Kebijakan Penanganan Covid-19

Strategi dan Arah Kebijakan terkait dengan Penanganan Covid-19 dalam RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021-2026 tidak terpisahkan dari strategi dan arah kebijakan dari setiap misi sebagaimana diuraikan sebelumnya. Dalam hal ini kegiatan penanganan covid-19 menjadi bagian dari pencapaian program pembangunan daerah, dengan fokus pada upaya

### 1. Penanganan Kesehatan

Penanganan Covid-19 di sektor kesehatan dilaksanakan melalui Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, yang dilaksanakan melalui Tracing (pelacakan kontak erat pasien terkonfirmasi), Testing (Screening Covid-19 melalui tes PCR dan swab antigen, serta pengiriman sampel ke laboratorium rujukan di dalam maupun diluar Kota Cilegon), Treatment (dengan meningkatkan fasilitas dan kapasitas pelayanan RSUD dan Puskesmas, Pelayanan ambulans rujukan serta kerjasama dengan Rumah sakit dan klinik swasta), Vaksinasi (pengawasan vaksin, operasional vaksinasi dan penanggulangan Kejadian Ikutan Paska Imunisasi/KIPI) dengan sasaran SDM kesehatan, Petugas Publik, Lansia, Masyarakat rentan dan umum, serta remaja usia 12-17 tahun, Komunikasi Informasi dan Edukasi Masyarakat melalui media massa baik cetak, online maupun radio dan media sosial, serta kegiatan



Pendukung yang meliputi pengadaan logistik baik berupa alat kesehatan, obat-obatan, vitamin, APD untuk nakes dan pemberian insentif tenaga kesehatan, serta operasionalisasi rumah Isolasi Mandiri.

## 2. Penanganan Dampak Sosial Ekonomi

Penanganan dampak ekonomi dan sosial akibat pandemi Covid-19 dilaksanakan dengan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga melalui pemberian Jaminan Sosial Cilegon Bermartabat (JSCB) disinergikan dengan bantuan sosial dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Banten. Selain itu, pemberian bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak juga dilaksanakan oleh OPD lain, meliputi bantuan sosial untuk tenaga kerja yang terkena PHK, bantuan sosial untuk petani dan nelayan, bantuan sosial untuk ojek pangkalan, bantuan stimulus untuk UMK, IKM, PKL dan tenaga kebersihan.

## 3. Penanganan Kebencanaan

Dalam urusan kebencanaan, penanganan pandemi Covid-19 dalam RPJMD 2021-2026 dilaksanakan melalui kegiatan Pelayanan dan Penyelamatan Respon Cepat Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) melalui Satgas Covid Tingkat Kota serta pos komando hingga tingkat Kelurahan untuk mewujudkan lingkungan RW Sehat Bebas Covid-19.

Dukungan pembiayaan tersebut dialokasikan melalui berbagai program pada Perangkat Daerah terkait ataupun melalui penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga.

Pencapaian rencana pendapatan dan belanja tahun 2023 tersebut dilakukan melalui strategi :

1. Penyiapan seluruh regulasi dan peraturan pelaksanaannya sebagai payung hukum pelaksanaan perubahan kebijakan bidang pendapatan daerah sebagaimana diatur melalui Undang-undang no 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Penyiapan SDM dan Kelembagaan melalui penempatan aparatur berbasis kompetensi jabatan sebagai tindak lanjut dan implementasi Perda No 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
3. Meningkatkan kualitas penerapan e-kinerja melalui penyiapan prasyaratnya baik terkait perencanaan kinerja organisasi dan individu, sistem pengukuran kinerja serta pengendalian dan evaluasi kinerja.





## **BAB VIII PENUTUP**

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, diperlukan pengelolaan pembangunan yang berkualitas dan akuntabel. Dengan demikian diharapkan dapat tercapainya sasaran yang efektif dan efisien, sehingga visi dan misi Pemerintah Kota Cilegon segera menjadi kenyataan sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.

Untuk menjabarkan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menggambarkan program dan kegiatan yang akan dibiayai dari APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2023.

Dalam penyusunan KUA-PPAS Kota Cilegon Tahun 2023, terdapat beberapa dinamika yang terjadi. Dinamika pertama adalah merebaknya Pandemi Covid-19 di seluruh dunia ketika proses perencanaan sedang berlangsung, hal ini tentunya sangat mempengaruhi target-target pembangunan yang tercantum pada dokumen perencanaan yang sedang disusun pada saat itu. Pada akhirnya, supaya tetap konsisten dengan proses perencanaan yang sudah berjalan, maka penyesuaian dilakukan pada target-target makro (beserta indikator pelengkapannya) dan menambahkan unsur pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat pada setiap program pembangunan pada dokumen perencanaan dan penganggaran di Kota Cilegon.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2023 tidak hanya akan menjadi prestasi Lembaga Eksekutif secara sepihak, tetapi adalah hasil kerja bersama dengan DPRD Kota Cilegon bahkan seluruh lapisan masyarakat Kota Cilegon. Untuk itu kedua lembaga eksekutif dan legislatif bersepakat untuk memperkuat, untuk saling memberikan dukungan serta kontribusi sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing dalam tahapan pembangunan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sampai pada tahap evaluasi guna memastikan terlaksananya program dan kegiatan sesuai Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023.

Kebijakan Umum APBD Kota Cilegon Tahun 2023 merupakan dokumen publik yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Kota Cilegon Tahun 2023, antara pihak Eksekutif dan Legislatif.

Cilegon, Juli 2022

Walikota Cilegon,

TTD

**H. HELLDY AGUSTIAN, SE, SH, MH**

